



# Analisis Peran Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam Implementasi Mekanisme Akuntabilitas Program Laut Sehat Bebas Sampah

Aulia Rasel Widodo\*, Nida Salma Aden, Khalil Albany Prayitno, Kayla Aqila Zahwa, Muhammad Prakoso Aji

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

**Abstrak:** Masalah sampah laut merupakan krisis lingkungan global yang kian mendesak, di mana Indonesia menempati posisi sebagai kontributor signifikan akibat tingginya kebocoran limbah dari daratan ke wilayah pesisir. Berbagai riset mengonfirmasi bahwa mayoritas sampah laut bersumber dari aktivitas darat yang minim pengelolaan, sehingga memicu dampak destruktif terhadap ekosistem, seperti rusaknya terumbu karang, degradasi mangrove, dan ancaman kematian biota laut. Menanggapi realitas ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menginisiasi program Laut Sehat Bebas Sampah (Laut Sebasah) sebagai instrumen strategis untuk menanggulangi pencemaran secara komprehensif dari sektor hulu hingga hilir. Penelitian ini menerapkan metode kualitatif deskriptif dengan judul "Analisis Peran Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam Implementasi Mekanisme Akuntabilitas Program Laut Sehat Bebas Sampah". Fokus penelitian tertuju pada peran KKP dalam mengoordinasikan pelaksanaan program dari level pusat hingga daerah, serta mengukur efektivitas mekanisme akuntabilitas publik yang dijalankan. Proses pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan peninjauan dokumen resmi mengenai kebijakan terkait. Berdasarkan analisis model administrasi rasional Max Weber, KKP terbukti telah membentuk struktur birokrasi yang hierarkis dan terorganisir, ditandai dengan spesialisasi tugas serta koordinasi rantai komando yang mapan. Sementara itu, ditinjau dari teori New Public Service (NPS), KKP berhasil mewujudkan akuntabilitas melalui pelibatan masyarakat, terutama nelayan, dalam model ekonomi sirkular berbasis pemanfaatan sampah laut. Secara garis besar, pembahasan menunjukkan bahwa keberhasilan program Sebasah sangat bergantung pada perpaduan antara regulasi fungsional dan pola kemitraan inklusif. Sinergi antara otoritas pemerintah dan keterlibatan masyarakat menjadi pilar utama dalam memperkuat akuntabilitas serta menjaga keberlanjutan ekosistem laut di Indonesia demi masa depan yang jauh lebih sehat dan lestari nantinya.

**Kata Kunci:** Kementerian Kelautan dan Perikanan, Birokrasi, Akuntabilitas Publik, Sampah Laut, Laut Sebasah

DOI:

<https://doi.org/10.53697/iso.v6i1.4063>

\*Correspondence: Aulia Rasel

Widodo

Email:

[2310412171@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2310412171@mahasiswa.upnvj.ac.id)

Received: 28-02-2026

Accepted: 28-03-2026

Published: 28-04-2026



**Copyright:** © 2026 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

**Abstract:** The issue of marine debris is an increasingly urgent global environmental crisis, with Indonesia ranking as a significant contributor due to the high volume of waste leaking from land into coastal areas. Various studies confirm that the majority of marine debris originates from poorly managed land-based activities, triggering destructive impacts on ecosystems, such as coral reef damage, mangrove degradation, and threats to marine biodiversity. In response to this reality, the Ministry of Marine Affairs and Fisheries (KKP) initiated the Healthy, Waste-Free Seas (Laut Sebasah) program as a strategic instrument to comprehensively address pollution from upstream to downstream sectors. This study, "Analysis of the Role of the Ministry of Marine Affairs and Fisheries in the Implementation of the Accountability Mechanism for the Healthy, Waste-Free Seas Program," employs a descriptive qualitative method. The research focuses on the KKP's role in coordinating program implementation from the central to the regional levels, while assessing the effectiveness of the public accountability mechanisms in place. Data collection was conducted through in-depth interviews and a review of official documents regarding relevant policies. Based on an analysis of Max Weber's rational-bureaucratic model, the KKP has established a hierarchical and organized bureaucratic structure, characterized by task specialization and a well-established chain of command. Meanwhile, from the perspective of the New Public Service (NPS) theory, the KKP has successfully fostered accountability through community engagement, particularly by involving fishermen within a circular economy model based on the utilization of marine debris. In general, the

*discussion indicates that the success of the Sebasah program is highly dependent on the combination of functional regulations and inclusive partnership models. Synergy between government authorities and community involvement serves as a primary pillar in strengthening accountability and safeguarding the sustainability of Indonesia's marine ecosystems for a healthier and more resilient future.*

**Keywords:** *Ministry of Marine Affairs and Fisheries, Bureaucracy, Public Accountability, Marine Debris, Laut Sebasah*

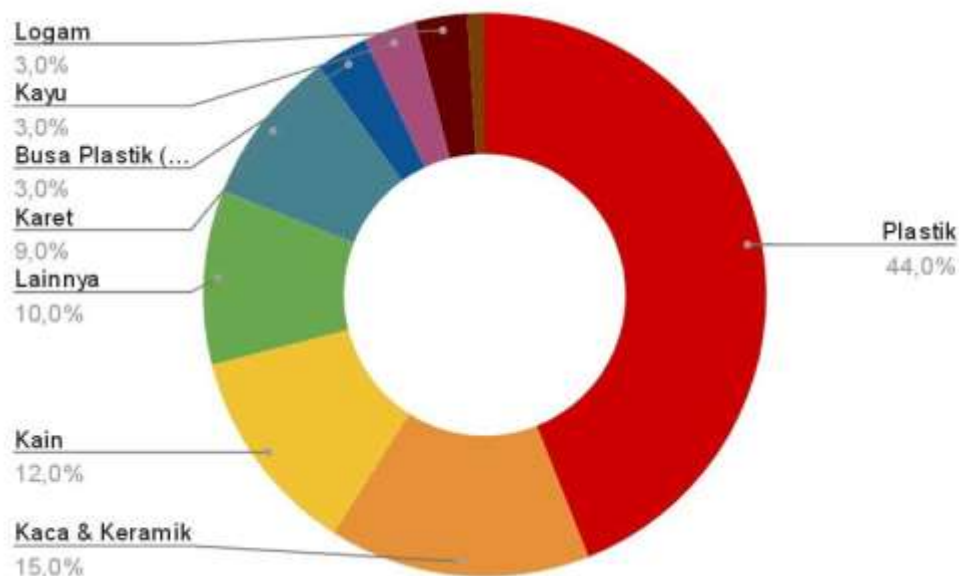
## **Pendahuluan**

Polusi sampah laut telah menjadi salah satu pusat perhatian dunia internasional dalam kurun dua dekade terakhir (Zulfahmi, 2023). Menurut (Meijer dkk., 2021), peristiwa ini disebabkan oleh 30 metrik ton sampah yang mencemari lautan setiap tahunnya. Selain itu, persebaran sampah laut dilaporkan telah menjangkau berbagai wilayah spasial, mulai dari kawasan khatulistiwa hingga ke kawasan kutub. Akumulasi sampah ini mencakup di seluruh tingkatan kedalaman air, mulai dari permukaan laut sampai ke dasar laut terdalam. Sampah laut atau marine debris telah diidentifikasi sebagai pemicu utama atas kerusakan ekosistem laut dan penurunan keanekaragaman hayati dalam empat puluh tahun terakhir (Harding, 2016). Sampah laut telah menjadi krisis lingkungan global yang serius, keberadaannya tidak hanya berdampak pada biota pesisir dan lautan tetapi juga pada aspek sosial dan ekonomi, seperti risiko kesehatan serta produktivitas sumber daya komersial. Komponen utama sampah laut sebagian besar terdiri atas plastik persisten yang sulit terurai dan mengandung bahan kimia beracun. Adanya proses pelapukan di laut telah menyebabkan sampah plastik pecah menjadi mikroplastik yang mencemari organisme laut. Produksi plastik terus meningkat sejak tahun 1950 dan diperkirakan akumulasi ini akan terus bertambah di dekade-dekade yang akan datang.

Lautan memiliki peran yang sangat krusial baik sebagai sumber kehidupan manusia ataupun sebagai habitat utama bagi berbagai biota laut (Kusumawati dkk., 2018). Manusia memanfaatkan kekayaan laut mulai dari area permukaan hingga perairan terdalam. Menurut (Small & Nicholls, 2003), sekitar 33% dari populasi global beraktivitas di wilayah pesisir, yang berkontribusi langsung dengan peningkatan polusi laut. Hal ini dipertegas oleh Charles Goddard, yakni seorang Executive Director World Ocean Summit 2017, yang menyoroti bahwa aktivitas manusia di pesisir telah menjadi ancaman nyata bagi kesehatan laut global. Salah satu konsekuensi utamanya adalah akumulasi sampah yang jumlahnya terus bertambah secara internasional. Kini, sampah laut telah menjadi ancaman multidimensi yang memengaruhi kelestarian biota, ekosistem perairan yang luas, kesehatan masyarakat pesisir, serta nilai estetika lingkungan (Topçu dkk., 2013). Selain itu, peristiwa ini berdampak signifikan pada sektor ekonomi yang bergantung pada wilayah laut dan pesisir. Estimasi pada tahun 2010 menunjukkan bahwa sekitar 4,8 hingga 12,7 juta ton limbah plastik telah mencemari lautan yang menempatkan ekosistem krusial seperti terumbu karang, hutan mangrove, dan padang lamun dalam kondisi berbahaya.

Berdasarkan data PBB, sekitar 45-70% sampah laut didominasi oleh sampah plastik. Material ini memiliki karakteristik berbahaya karena dapat terfragmentasi menjadi mikroplastik yang meracuni organisme laut. Oleh karena itu, strategi utama dalam mengatasi persoalan ini adalah mencegah proses dekomposisi atau proses penguraian sampah di laut melalui pendekatan kebijakan terpadu dan preventif. Langkah ini dinilai sebagai cara yang paling efektif untuk melindungi keanekaragaman hayati pesisir.

Secara global, Indonesia berada dalam posisi yang mendesak karena menempati peringkat kedua sebagai penyumbang polutan plastik ke laut setelah Cina dengan estimasi yang mencapai sekitar 200.000 ton per tahun (Jambeck dkk., 2015). Kondisi ini berakar dari masalah pengelolaan sampah domestik, yang mana total produksi sampah per tahun sekitar 37.811.293,71 ton, sementara total sampah yang tidak terkelola per tahunnya adalah 14.163.963,52 ton. Tingginya volume sampah yang tidak terkelola ini sangat berisiko terbawa arus sungai menuju laut (Fikry dkk., 2024). Mengingat sumbernya berasal dari aktivitas di darat maupun laut, penanggulangan sampah laut menjadi kewajiban yang setara pentingnya dengan penanganan sampah di daratan. Adapun komposisi material yang ditemukan di perairan Indonesia.



**Gambar 1.** Komposisi material sampah laut di Indonesia

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menetapkan polusi sampah laut sebagai ancaman strategis yang berpotensi besar merusak kelestarian alam sekaligus mengganggu stabilitas ekonomi negara. Dengan estimasi sekitar 20 juta ton sampah yang mencemari perairan Indonesia, khususnya yang bersumber dari aliran sungai, kawasan pesisir, dan pulau-pulau kecil, KKP merespon dengan serangkaian kebijakan tegas. Upaya tersebut meliputi kewajiban bagi kapal perikanan untuk membawa kembali sampah mereka ke daratan, perluasan regulasi di pelabuhan umum, hingga penguatan kebijakan nasional melalui revisi aturan pengelolaan sampah. Selain itu, kolaborasi lintas sektor diperkuat melalui pemasangan *trash boom* di sungai dan penggunaan insinerator di wilayah tertentu

sebagai solusi transisi demi mencapai target nasional pengendalian sampah secara menyeluruh pada tahun 2029. Dampak dari polusi ini bersifat multidimensional, yakni mencakup aspek ekologi, ekonomi, hingga sosial. Secara ekologis, sampah plastik telah merusak habitat penting seperti terumbu karang dan mangrove, serta mengancam nyawa biota laut yang terjerat atau mengonsumsi limbah tersebut. Bahkan, mikroplastik kini telah masuk ke rantai makanan dan mengancam kesehatan manusia. Dasi aspek ekonomi, pencemaran ini menurunkan persentase tangkapan nelayan hingga sebesar 30%, merusak peralatan kerja, dan melemahkan nilai atau daya tarik destinasi wisata pesisir. Pada aspek sosial, tekanan ekonomi ini turut memicu potensi konflik horizontal di lingkungan masyarakat, seperti perubahan perilaku penduduk, serta peningkatan risiko kesehatan akibat paparan dari polusi pembakaran sampah dan mikroplastik.

Sebagai langkah komprehensif, Kementerian Kelautan dan Perikanan meluncurkan program Laut Sehat Bebas Sampah (Laut Sebasah) yang menggunakan pendekatan hulu-hilir dengan target pengurangan sampah laut sebesar 70% pada tahun 2029. Secara administratif, mekanisme program ini beroperasi melalui penetapan standar nasional dan sistem monitoring "Neraca Sampah Laut" oleh pemerintah pusat, yang kemudian harus diimplementasikan secara operasional oleh pemerintah daerah di tingkat tapak. Program ini mengandalkan sistem insentif dan disinsentif fiskal untuk mendorong kinerja daerah, di mana capaian pengelolaan sampah di pesisir menjadi indikator evaluasi kebijakan dan dukungan anggaran dari pusat. Namun, efektivitas mekanisme administratif tersebut dapat mengalami kendala apabila terdapat tumpang tindih kewenangan dan lemahnya koordinasi antara pusat dan daerah. Hal ini sangat memungkinkan untuk terjadi di area abu-abu dalam pengelolaan wilayah pesisir dan muara sungai, yakni ketika mandat kementerian pusat berbenturan dengan otonomi daerah dalam pengelolaan sampah daratan sehingga izin dari daerah seringkali dianggap tidak sah oleh pemerintah pusat, seperti kasus Pagar Laut yang terjadi di Tangerang, (Purwanto, 2025) Fragmentasi ini diperparah oleh perbedaan kapasitas kelembagaan dan sumber daya antarwilayah yang menciptakan ketimpangan implementasi di lapangan. Harmonisasi regulasi yang belum tuntas sering kali membuat instruksi pusat sulit diterjemahkan ke dalam peraturan daerah, sehingga kebijakan pengendalian sampah cenderung tidak sinkron dan berpotensi menimbulkan tumpang tindih birokrasi yang menghambat aksi cepat di lapangan. Oleh karena itu, urgensi penelitian terhadap implementasi program Laut Sebasah menjadi sangat krusial untuk menjembatani kesenjangan antara desain kebijakan dan praktik di lapangan. Kajian mendalam diperlukan untuk mengevaluasi sejauh mana koordinasi pusat-daerah berjalan optimal dan bagaimana tumpang tindih administrasi dapat diselesaikan melalui integrasi kebijakan yang lebih solid. Penelitian ini tidak hanya berfungsi untuk menilai capaian angka pengurangan sampah, tetapi juga untuk merumuskan rekomendasi strategis dalam memperkuat tata kelola, sinkronisasi regulasi, serta memastikan efektivitas kebijakan pengendalian sampah laut Indonesia secara berkelanjutan.

Dengan berfokus pada peran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam mengkoordinasikan implementasi program Laut Sehat Bebas Sampah (Laut Sebasah) secara hierarkis; mulai dari perumusan strategi di tingkat pusat hingga eksekusinya di tingkat daerah, dan evaluasi proses koordinasi birokrasi antarlembaga melalui tinjauan fungsi kebijakan, koordinasi lintas sektor, serta pengawasan di tingkat pusat dan daerah. Hal

tersebut dilakukan guna mengidentifikasi hambatan struktural maupun administratif yang muncul dalam pengelolaan sampah di laut. Peneliti juga turut mengevaluasi mekanisme akuntabilitas publik untuk menakar transparansi dan efektivitas pelaporan kinerja instansi terkait. Melalui analisis yang komprehensif terkait ketiga elemen tersebut, studi ini diharapkan mampu memetakan keberhasilan kebijakan sekaligus memberikan kontribusi strategis bagi perbaikan tata kelola pengendalian sampah laut di Indonesia.

Peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat teoritis dengan memperkaya pengembangan ilmu administrasi publik, khususnya dalam kajian birokrasi dan implementasi kebijakan lingkungan, melalui analisis yang menempatkan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai aktor utama dalam koordinasi kebijakan pengendalian sampah laut, serta menjelaskan secara konseptual bagaimana teori birokrasi, implementasi kebijakan, dan koordinasi antar lembaga dapat digunakan untuk memahami dinamika pelaksanaan program berbasis lingkungan yang melibatkan banyak aktor sehingga hasil penelitian dapat menjadi referensi akademik bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji isu serupa.

Penelitian mengenai implementasi kebijakan lingkungan menunjukkan bahwa keberhasilan suatu kebijakan tidak semata-mata ditentukan oleh kualitas perumusannya, tetapi juga oleh bagaimana kebijakan tersebut dijalankan di lapangan. Sejumlah studi menegaskan bahwa kapasitas institusi, ketersediaan infrastruktur, serta tingkat partisipasi masyarakat menjadi faktor penting dalam menentukan efektivitas implementasi. (Tuhumury dkk., 2024), misalnya, menemukan bahwa sampah di tingkat daerah masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sarana dan rendahnya kesadaran masyarakat yang pada akhirnya menghambat pencapaian tujuan kebijakan. Temuan ini memperlihatkan bahwa dimensi administratif dan sosial tidak dapat dipisahkan dalam studi implementasi kebijakan lingkungan. Di sisi lain, pendekatan yang lebih mutakhir mulai melihat implementasi sebagai proses yang melibatkan jaringan aktor yang lebih luas. (Riko Apriliano dkk., 2025) melalui pendekatan *Actor-Network Theory* menunjukkan bahwa selain aktor manusia, elemen seperti teknologi, data, dan sistem informasi juga berperan dalam membentuk keberhasilan implementasi kebijakan. Perspektif ini memberikan pemahaman yang lebih komprehensif dengan menempatkan implementasi sebagai hasil dari interaksi berbagai elemen yang saling berkaitan. Selain itu, integrasi prinsip pembangunan berkelanjutan dalam kebijakan lingkungan juga semakin dipandang sebagai syarat penting untuk memastikan keberlanjutan hasil kebijakan dalam jangka panjang. Dalam konteks pengelolaan sampah laut, literatur lain menunjukkan bahwa isu ini memiliki kompleksitas yang lebih tinggi karena bersifat lintas batas dan melibatkan banyak aktor dari berbagai level pemerintahan. (Ramadhan & Burhanuddin, 2023) menekankan pentingnya kerangka kerja regional seperti ASEAN Framework of Action on Marine Debris sebagai sarana untuk memperkuat koordinasi antarnegara dalam menangani pencemaran laut. Meskipun demikian, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa tantangan utama justru terletak pada lemahnya tata kelola di tingkat implementasi. (Sudirman dkk., 2023) menemukan bahwa kelemahan dalam tata kelola lingkungan di kawasan Asia Tenggara berkontribusi pada meningkatnya risiko ketidakamanan lingkungan, yang mencerminkan adanya kesenjangan antara komitmen kebijakan dan realisasinya di lapangan. Hal serupa juga ditunjukkan dalam studi terbaru di (Rakotoarisoa dkk., 2026) yang mengindikasikan

bahwa meskipun terdapat kemajuan dalam upaya pengurangan sampah di laut di Indonesia, masih terdapat fragmentasi tata kelola dan lemahnya integrasi antar level pemerintahan. Dalam situasi ini, pendekatan *collaborative governance* menjadi sangat relevan, karena menekankan pada pentingnya keterlibatan berbagai aktor, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Namun, dalam praktiknya, kolaborasi tersebut masih sering dihadapkan pada persoalan koordinasi, pembagian peran, dan keselarasan kepentingan antar aktor.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dilihat bahwa masih terdapat sejumlah kesenjangan dalam penelitian yang ada. Sebagian besar studi cenderung membahas implementasi kebijakan lingkungan secara umum atau berfokus pada konteks daerah tertentu, sehingga kajian yang secara spesifik menyoroti implementasi program nasional, khususnya dalam pengelolaan sampah laut, masih relatif terbatas. Selain itu, terdapat kecenderungan pemisahan antara studi implementasi kebijakan dan studi koordinasi birokrasi, padahal keduanya memiliki keterkaitan yang erat dalam praktik kebijakan publik. Kajian mengenai *multi-level governance* juga masih belum banyak didukung oleh penelitian empiris yang mendalam, terutama dalam melihat bagaimana interaksi antarlevel pemerintahan berlangsung dalam implementasi program konkret di Indonesia. Di sisi lain, dinamika aktor dan relasi kekuasaan dalam birokrasi juga belum banyak mendapat perhatian, sehingga birokrasi seringkali dipahami secara statis sebagai struktur formal semata. Meskipun pendekatan *collaborative governance* telah banyak digunakan, kajian yang secara spesifik mengevaluasi efektivitas kolaborasi dalam pengelolaan sampah laut di Indonesia masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya untuk mengisi kesenjangan tersebut dalam mengkaji implementasi program Laut Sehat Bebas Sampah melalui analisis koordinasi birokrasi dan interaksi antar aktor dalam kerangka tata kelola *multi-level*.

## Metodologi

Teori *Bureaucracy Rational Administrative Model* atau Birokrasi Model Administrasi Rasional yang dikemukakan oleh Max Weber menekankan efisiensi dan koordinasi melalui struktur organisasi yang sistematis. Dengan rantai komando yang teratur, pembagian peran yang spesifik, standarisasi melalui aturan formal, serta penerapan prinsip rasionalitas, diharapkan dapat menghasilkan keputusan yang objektif dalam setiap pengambilan keputusan (Wicaksono & Aji, 2025).

Dalam konteks implementasi pada program kerja Laut Sebasah, teori ini digunakan sebagai kerangka analisis untuk membedah bagaimana koordinasi birokrasi dilakukan di lapangan. Peneliti menggunakan elemen dalam struktur Weber untuk melihat apakah struktur koordinasi dalam program laut sebasah sudah memiliki pembagian tugas yang jelas dan hierarki yang teratur guna menghindari tumpang tindih tanggung jawab. Melalui teori ini, keberhasilan implementasi diukur berdasarkan sejauh mana para pelaksana kebijakan bekerja secara profesional mengikuti aturan formal serta menjaga objektivitas tanpa pengaruh dari kepentingan pribadi, sehingga koordinasi tetap stabil dan selaras dengan tujuan program yang telah ditetapkan.

Peneliti turut menyertakan penggunaan teori New Public Service sebagai pendekatan dalam mengkaji koordinasi birokrasi antarlembaga sebagai proses kolaboratif lintas aktor, yakni peran pemerintah sebagai fasilitator dalam mewujudkan sinergi antara pusat, daerah,

dan masyarakat, termasuk mekanisme akuntabilitas publik yang bersifat multidimensional dan partisipatif. Teori New Public Service (NPS) dikembangkan oleh Robert B. Denhardt dan Janet Vinzant Denhardt, yang mana keduanya merupakan seorang profesor di School of Public Affairs di Arizona State University (Denhardt, 2007). Pada konsepnya, teori ini tidak hanya berpaku pada regulasi yang dicetuskan oleh politisi, melainkan hasil dari proses negosiasi pemerintah dalam memetakan hubungan warga dan komunitas. Hal ini bertujuan agar tanggung jawab kepada masyarakat secara kolektif diserahkan kepada birokrasi. Sebagaimana dengan pandangan (Denhardt, 2007), administrasi publik memiliki peran yang krusial dalam mewujudkan layanan prima, tata kelola demokratis, serta partisipasi aktif warga. Adanya peran masyarakat sebagai pemilik kepentingan yang sah menyebabkan administrator publik wajib berfokus pada pelayanan dan pelibatan masyarakat dalam pengelolaan kebijakan publik.

Implementasi program Laut Sehat Bebas Sampah oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dapat dikaji melalui teori New Public Service yang menekankan bahwa kebijakan publik harus lahir dari negosiasi kebutuhan warga, tidak hanya sekadar mandat politik. Pada konteks ini, koordinasi antaraktor, yakni pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat bersifat kolaboratif-partisipatif yang menempatkan masyarakat sebagai pemilik kepentingan utama di garda terdepan. Hal ini menyebabkan akuntabilitas publik turut menjadi multidimensional, yang mana secara administratif, birokrasi juga bertanggung jawab secara penuh atas moral dan sosial kepada publik melalui partisipatifnya dengan melibatkan masyarakat. Adanya keutamaan integritas dan responsivitas, penggunaan teori New Public Service dapat digunakan untuk memastikan bahwa program Laut Sehat Bebas Sampah dapat berjalan secara partisipatif dan demokratis.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis untuk memahami secara mendalam dinamika implementasi kebijakan dalam program Laut Sehat Bebas Sampah (Sebasah) yang dijalankan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pendekatan kualitatif digunakan karena penelitian ini berfokus pada proses, interaksi, serta makna yang muncul dalam koordinasi birokrasi antarlembaga yang tidak dapat dijelaskan melalui pendekatan kuantitatif. Penelitian ini memanfaatkan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pejabat atau pelaksana kebijakan di lingkungan KKP yang memiliki keterlibatan langsung dalam implementasi program, sehingga informasi yang diperoleh bersifat kontekstual dan aktual. Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi pemerintah, laporan kebijakan, peraturan perundang-undangan, serta literatur ilmiah yang relevan untuk memperkuat kerangka analisis penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan studi dokumentasi guna memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai proses implementasi kebijakan serta mekanisme koordinasi birokrasi antara pemerintah pusat dan daerah.

Proses analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan yang dilakukan secara sistematis. Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi, memfokuskan, dan menyederhanakan data yang telah dikumpulkan sesuai dengan rumusan masalah penelitian. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif yang terstruktur agar memudahkan peneliti dalam memahami pola hubungan

antar variabel yang diteliti. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menginterpretasikan temuan penelitian berdasarkan kerangka teori yang digunakan, khususnya teori birokrasi dan implementasi kebijakan, sehingga menghasilkan analisis yang komprehensif dan mendalam. Proses analisis data juga didukung dengan teknik triangulasi sumber untuk meningkatkan validitas dan reliabilitas data, sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Seluruh tahapan penelitian disusun secara sistematis untuk memastikan bahwa proses analisis mampu menggambarkan secara utuh dinamika koordinasi birokrasi dan akuntabilitas dalam implementasi program Laut Sebasah.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Peran Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam Implementasi Program Laut Sehat Bebas Sampah**

Urgensi penanganan sampah laut di Indonesia mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menginisiasikan program Laut Sehat Bebas Sampah (Laut Sebasah). Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti bersama dengan Bapak R. Andry Indryasworo Sukmoputro, M.M. selaku Pembina Utama Muda Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Mayda, disebutkan bahwa mayoritas kebocoran sampah ke laut berasal dari darat, yang mana persoalan ini menjadi tantangan kompleks sebab berdampak buruk pada degradasi ekosistem pesisir dan kematian biota. Hal ini memperkuat urgensi kebijakan yang terstruktur dari KKP sebagai otoritas yang bertanggung jawab atas kelestarian sektor kelautan dan perikanan.

Pada proses pengelolaan program Laut Sebasah, KKP bertindak sebagai instansi utama yang mengarahkan implementasi melalui sistem birokrasi bertingkat. Jika ditinjau melalui teori Max Weber, pola ini menerapkan pembagian tugas yang formal serta garis komando yang tegas, yang mana wewenang bergerak secara vertikal dari pemerintah pusat, turun ke pemerintah daerah, hingga mencapai Unit Pelaksana Teknis (UPT). Bapak Suryo Prasajo, S.T., M.Si., M.Sc selaku Pembina Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Madya menjelaskan bahwa setiap jenjang birokrasi dalam program Laut Sebasah memiliki spesialisasi fungsi yang saling mendukung, yakni level pusat merumuskan strategi, level daerah mengoordinasikan pelaksanaan, dan level UPT untuk melaksanakan eksekusi teknis. Secara teoritis, keteraturan dan akuntabilitas dalam struktur ini menjadi kunci dalam mendorong keberhasilan serta efektivitas program di lapangan.

Efektivitas birokrasi dalam program ini sangat dipengaruhi oleh seberapa jelas kewenangan didistribusikan antarlevel pemerintahan (Davis, 1996). Persoalan sampah laut yang bersifat lintas sektor, seperti melibatkan pengelolaan di wilayah daratan, sungai, dan pantai menuntut adanya deliniasi tugas yang tajam untuk mencegah kerancuan peran. KKP memerlukan kolaborasi strategis dengan berbagai kementerian, otoritas daerah, serta aktor non-pemerintah karena luasnya cakupan permasalahan yang ada. Pada konteks tersebut, kejelasan otoritas legal-rasional menjadi prasyarat penting bagi terciptanya akuntabilitas, yang mana setiap lembaga menyadari batas kewenangannya dan mampu berpartisipasi secara optimal dalam kerangka kerja sama yang terarah.

Sebagai respons terhadap berbagai tantangan tersebut, pemerintah sedang memformulasikan kerangka regulasi yang terintegrasi guna memberikan landasan hukum

bagi program Laut Sebasah. Salah satu langkah strategisnya adalah melalui penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah, yang dirancang untuk menangani masalah sampah secara komprehensif dari sektor hulu hingga ke hilir. Regulasi ini bertujuan untuk menekan angka kebocoran sampah dari daratan ke wilayah perairan melalui pendekatan yang sistemik. Guna melengkapi aturan tersebut, KKP turut menyiapkan Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan sebagai aturan sektoral yang secara spesifik mengatur mekanisme pelaksanaan program Laut Sebasah, termasuk pembagian tanggung jawab, prosedur teknis, hingga ketetapan sanksi. Kehadiran perangkat hukum ini merupakan upaya nyata dalam melembagakan standar operasional yang baku demi menunjang keberhasilan implementasi program.

Pada dimensi operasionalnya, program Laut Sebasah mengandalkan SOP yang mencerminkan pola pikir rasional guna mencapai tujuan yang terukur. Indikator keberhasilan utama yang mengarahkan program ini adalah target penurunan sampah di laut sebesar 70% pada tahun 2029. Implementasi strategisnya mencakup inisiatif seperti Bulan Cinta Laut (BCL) yang mendorong aksi pembersihan secara massal di kawasan pesisir. Lebih jauh lagi, integrasi prinsip ekonomi sirkular menjadi pilar penting melalui peran nelayan yang mengumpulkan limbah laut untuk disalurkan ke unit pengelolaan bank sampah. Pendekatan ini menciptakan ekosistem yang produktif, yang mana efisiensi penanganan sampah berjalan selaras dengan pemberian insentif ekonomi bagi komunitas nelayan.

Pada dimensi praktisnya, program Laut Sebasah mengadopsi pendekatan bertahap yang sangat memperhatikan karakteristik lokal melalui identifikasi wilayah dan pemetaan aktor secara mendalam. Adanya indikator terukur seperti neraca sampah laut menegaskan bahwa strategi yang diambil berakar pada data yang akurat. Maka, dapat diartikan bahwa integrasi antara hierarki birokrasi, kejelasan otoritas, serta standarisasi operasional yang terukur merupakan faktor kunci yang mendukung implementasi program Laut Sebasah. Walaupun demikian, keberlanjutan capaian program ini tetap memerlukan koordinasi antarlembaga yang harmonis dan kemampuan kebijakan untuk beradaptasi dengan perubahan situasi di lapangan.

Dalam perspektif *Rational Administrative Model* yang dikemukakan oleh Max Weber, kapasitas administratif merupakan pondasi utama dalam menentukan efektivitas implementasi kebijakan publik. Weber menekankan bahwa birokrasi ideal harus didukung oleh struktur organisasi yang jelas, pembagian tugas yang sistematis, serta aparatur yang memiliki kompetensi teknis sesuai bidangnya. Dengan demikian, ketersediaan sumber daya manusia (SDM), anggaran, dan sarana-prasarana menjadi elemen krusial dalam mendukung rasionalitas dan efisiensi birokrasi.

Selanjutnya, dalam konteks implementasi program Laut Sehat Bebas Sampah (Sebasah), kapasitas administratif antara pemerintah pusat dan daerah menunjukkan adanya ketimpangan yang cukup signifikan. Keterbatasan jumlah dan kualitas SDM di tingkat daerah seringkali menjadi hambatan utama dalam menjalankan kebijakan secara optimal. Hal ini sejalan dengan temuan bahwa kualitas dan kapasitas aparatur masih menjadi persoalan mendasar dalam reformasi birokrasi di Indonesia (Pratiwi dkk., 2022). Kondisi

tersebut menyebabkan implementasi kebijakan tidak berjalan secara seragam, sehingga target nasional sulit tercapai secara merata.

Selain itu, aspek anggaran juga memegang peranan penting dalam mendukung efektivitas kebijakan. Weberian bureaucracy menekankan pentingnya rasionalitas dalam penggunaan sumber daya, di mana setiap program harus didukung oleh alokasi anggaran yang memadai, terencana dan berbasis kepada kebutuhan implementasi. Namun, dalam prakteknya, keterbatasan anggaran di tingkat daerah seringkali menghambat pelaksanaan program, terutama dalam penyediaan infrastruktur pengelolaan sampah seperti fasilitas pengumpulan, pengolahan, dan transportasi limbah. Di sisi lain, terdapat kecenderungan penerapan mekanisme insentif dan disinsentif sebagai instrumen untuk mendorong kinerja daerah, di mana wilayah dengan capaian kinerja yang baik berpotensi memperoleh dukungan anggaran yang lebih besar, baik dalam bentuk kebijakan fiskal maupun non-fiskal. Pendekatan ini mencerminkan prinsip rasionalitas dalam alokasi sumber daya berbasis kinerja, namun tanpa disertai intervensi afirmatif, kebijakan tersebut berpotensi memperlebar kesenjangan antar daerah, terutama bagi wilayah yang memiliki kapasitas awal yang terbatas.

Keterbatasan sarana-prasarana, khususnya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil juga menjadi salah satu kendala utama. Infrastruktur pengelolaan sampah yang belum memadai menyebabkan daerah belum mampu mengelola sampah secara mandiri, bahkan masih bergantung pada pengangkutan ke wilayah lain yang memerlukan biaya yang tinggi dan beresiko terhadap lingkungan. Dalam administrasi publik, proses pengorganisasian sumber daya harus berjalan secara sistematis untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua daerah memiliki fasilitas yang memadai untuk mendukung implementasi kebijakan pengelolaan sampah laut. Kondisi tersebut mencerminkan belum optimalnya kesiapan struktural yang secara signifikan menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan secara efektif dan efisien. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip rasionalitas Weber belum sepenuhnya terwujud, terutama dalam hal integrasi antara perencanaan kebijakan dan kesiapan sumber daya.

Lebih lanjut, efektivitas implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya dan koordinasi antar lembaga, yang menjadi faktor kunci dalam keberhasilan pelayanan publik (Addawiyah Addawiyah dkk., 2025). Dengan demikian, kapasitas administratif yang tidak merata akan berdampak langsung pada kualitas implementasi kebijakan, sehingga diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan kompetensi aparatur, serta distribusi sumber daya yang lebih merata.

Pada kerangka teori Weber, mekanisme pengendalian dan supervisi merupakan bagian integral dari sistem birokrasi yang rasional. Weber menekankan pentingnya hierarki yang jelas dan sistem pengawasan berbasis aturan formal untuk memastikan bahwa setiap aktivitas organisasi berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pengendalian ini diwujudkan melalui sistem monitoring, evaluasi, serta pelaporan berjenjang yang memungkinkan adanya kontrol administratif dari tingkat pusat hingga daerah.

Dalam implementasi program Laut Sebasah, prinsip tersebut tercermin melalui pengembangan sistem informasi berbasis digital yaitu Sistem Informasi Sampah Laut (SI SALUT), yang berfungsi untuk mengintegrasikan data persampahan serta memantau

perkembangan pelaksanaan program di daerah. Keberadaan sistem ini memperkuat pengendalian administratif yang bersifat terstruktur, transparan, dan berbasis data. Selain itu, pengendalian juga dilaksanakan melalui mekanisme penilaian dan pemeringkatan kinerja daerah, yang diikuti dengan pemberian insentif maupun disinsentif. Pola ini menunjukkan adanya kontrol administratif yang bersifat hierarkis dan top-down, di mana pemerintah pusat memiliki peran dominan dalam menetapkan standar serta mengevaluasi capaian daerah.

Namun demikian, terdapat indikasi perkembangan menuju mekanisme pengendalian yang lebih adaptif, khususnya melalui penerapan prinsip transparansi, di mana sistem informasi yang dikembangkan bersifat terbuka (*open access*), sehingga memungkinkan berbagai pihak, termasuk masyarakat, untuk mengakses informasi dan melakukan evaluasi.

Akan tetapi, sistem pelaporan berjenjang yang bersifat top-down berpotensi mengurangi fleksibilitas daerah dalam menyesuaikan kebijakan dengan kondisi lokal, sehingga diperlukan keseimbangan antara kontrol pusat dan adaptasi daerah. Koordinasi antar lembaga juga menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan pengendalian kebijakan, di mana lemahnya koordinasi dapat menghambat efektivitas implementasi (Addawiyah Addawiyah dkk., 2025).

Pada konteks ini, koordinasi antar lembaga menjadi faktor penting dalam mendukung efektivitas pengendalian, mengingat lemahnya koordinasi dapat menghambat implementasi kebijakan. Oleh karena itu, mekanisme supervisi tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol, tetapi juga sebagai instrumen evaluasi untuk meningkatkan kualitas kebijakan sehingga dalam konteks ini, diperlukan transformasi mekanisme pengendalian dari yang semata-mata bersifat hierarkis menuju pendekatan yang lebih adaptif dan kolaboratif. Hal ini sejalan dengan perkembangan paradigma administrasi publik modern yang menekankan pentingnya koordinasi lintas aktor dan fleksibilitas dalam implementasi kebijakan. Dengan demikian, mekanisme pengendalian tidak hanya memastikan kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga mampu mendorong inovasi dan responsivitas dalam pelaksanaan program.

### **Koordinasi Birokrasi Antarlembaga dalam Implementasi Program Laut Sebasah**

Koordinasi birokrasi antarlembaga dalam implementasi program Laut Sebasah menunjukkan adanya pergeseran pola tata kelola dari yang bersifat hierarkis menuju pola yang lebih kolaboratif, sebagaimana dijelaskan dalam perspektif New Public Service (NPS). pelaksanaan program ini melibatkan berbagai aktor lintas sektor, mulai dari kementerian/lembaga, pemerintah daerah, hingga masyarakat dan komunitas pesisir, sehingga mencerminkan karakter *network governance* yang menekankan interaksi dan kerja sama antar pihak (Klijn dkk, 2025).

Temuan di lapangan menegaskan bahwa penanganan sampah laut merupakan persoalan kompleks yang melampaui satu instansi saja. Keterlibatan berbagai pihak mulai dari pemerintah daerah, Kementerian Lingkungan Hidup, hingga Kementerian Pekerjaan Umum, menuntut adanya integrasi peran yang presisi. Kondisi ini mengindikasikan bahwa koordinasi yang dibangun bersifat lintas sektor dan membutuhkan integrasi peran yang jelas antara pihak-pihak tersebut. Dalam konteksnya, KKP berperan sebagai mediator yang

menghubungkan berbagai aktor, khususnya dalam mendorong keterlibatan seluruh pihak dan memastikan setiap institusi menjalankan fungsi sesuai kewenangannya. Hal ini tercermin dalam upaya KKP untuk mendorong partisipasi berbagai pihak agar dapat memaksimalkan peran masing-masing dalam penyelesaian permasalahan sampah laut. Peran tersebut tidak hanya berfungsi sebagai regulator, tetapi juga sebagai fasilitator yang mengoordinasikan kepentingan antar aktor, sejalan dengan prinsip NPS yang menekankan pentingnya pelayanan publik berbasis kolaborasi (Denhardt, 2007). Meskipun demikian, praktik koordinasi yang berlangsung masih menghadapi tantangan, terutama terkait potensi sektoralisasi akibat perbedaan kewenangan dan kapasitas antar lembaga yang belum sepenuhnya terintegrasi.

Selanjutnya, bentuk kolaborasi dalam implementasi program Laut Sebasah ini juga terlihat melalui pendekatan berbasis masyarakat yang menempatkan publik sebagai bagian integral dari proses kebijakan. Program ini tidak hanya mengandalkan peran birokrasi, tetapi juga mendorong keterlibatan masyarakat pesisir dalam berbagai kegiatan seperti pembersihan sampah laut, edukasi, dan kampanye lingkungan. Informasi yang diperoleh menunjukkan bahwa KKP berupaya melibatkan nelayan dalam kegiatan pembersihan sampah sebagai bentuk aksi kolektif yang dilakukan secara bersama-sama.

Selain itu, adanya pengembangan sistem seperti bank sampah pesisir dan pemberian dukungan sarana menunjukkan bahwa kolaborasi yang dibangun juga mencakup aspek pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip NPS yang menempatkan masyarakat sebagai aktor aktif atau *co-producer* dalam implementasi kebijakan publik, bukan sekadar penerima manfaat (Denhardt, 2007). Keterlibatan komunitas lokal dan potensi partisipasi organisasi non-pemerintah turut memperkuat karakter kolaboratif dalam pelaksanaan program. Namun demikian, dinamika koordinasi ini juga dihadapkan pada berbagai hambatan, seperti keterbatasan sarana dan prasarana di wilayah pesisir, variasi tingkat kesiapan antar daerah, serta tantangan dalam menjaga keberlanjutan partisipasi masyarakat, dan kompleksitas koordinasi lintas sektor juga menuntut adanya kejelasan pembagian peran dan mekanisme kerja yang lebih terintegrasi.

### **Mekanisme Akuntabilitas Publik dalam Implementasi Program**

Pada implementasi program Laut Sehat Bebas Sampah (Laut Sebasah), mekanisme akuntabilitas publik yang dikaji melalui pendekatan *New Public Service (NPS)* menunjukkan pergeseran peran Pemerintah yang signifikan, dari yang awalnya sangat menjunjung hierarki menjadi multiaspek dimana hanya menjadi fasilitator yang melayani, mengajak keikutsertaan banyak pihak dalam menjalankan program, mulai dari antarlembaga, sektor swasta, hingga keterlibatan masyarakat secara langsung (Denhardt, 2007).

Akuntabilitas administratif dalam program ini diterapkan melalui sistem pelaporan kinerja yang transparan dan berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat. Hal ini tercermin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang secara konsisten meraih predikat 'A' dalam evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sejak tahun 2013 hingga 2024 (Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, 2025a). Selain itu, evaluasi berbasis indikator yang diterapkan dalam program Laut Sebasah yang dilakukan secara ketat melalui instrumen "Neraca Sampah Laut" di kawasan pantau untuk mengukur perubahan perilaku dan tanggung jawab pemangku kepentingan secara konkret

serta memastikan target pengurangan sampah laut sebesar 70% pada tahun 2029 tetap berada dalam jalurnya. Dalam mengukur efektivitas implementasi program di lapangan, KKP juga bekerja sama dengan perguruan tinggi, hingga NGO lokal di tiap provinsi di bawah pengawasan BPS untuk mempertahankan objektivitas (Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, 2025).

Selain itu, akuntabilitas horizontal yang terjalin antarlembaga pada implementasi program Laut Sehat Bebas Sampah (Laut Sebasah) menempatkan pemerintah (KKP) sebagai fasilitator pembangun koalisi lintas sektor dibanding sebagai pemegang kendali tunggal, yang terwujud melalui nota kesepahaman (MoU) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan kementerian lain seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sebagai pemegang kendali di hulu, membuat peraturan berkaitan guna menjaga lingkungan tetap sehat, serta memastikan pabrik-pabrik yang beroperasi taat peraturan pembuangan limbah supaya tidak memperparah kondisi laut. Kemudian ada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang memaksimalkan fungsi lembaga sebagai penyedia fasilitas atau alat yang akan digunakan untuk kepentingan dalam proses pembangunan serta pengolahan sampah di wilayah prioritas dengan timbulan sampah terbanyak sekaligus mencegah limbah rumah tangga bermuara ke laut dengan berkoordinasi dengan pemerintah daerah seperti DKI Jakarta, Bali, dan NTB untuk mensinkronkan penanganan sampah sungai dan pesisir (Prihatini & Bambang, 2025)

Lalu, berdasarkan hasil wawancara peneliti bersama Bapak Suryo Prasajo S.T., M.Si, M.Sc. yang merupakan Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Madya yang turut serta mengawal program kerja Laut Sebasah dari awal mengatakan bahwa akuntabilitas sosial pada implementasi program Laut Sehat Bebas Sampah (Laut Sebasah) ini akan diterapkan melalui website (SI SALUT) yang bersifat *open access* yang kini sedang dalam tahap perancangan. Usaha tersebut dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) guna menyediakan informasi yang akurat, transparan, dan relevan kepada masyarakat supaya mereka dapat melihat dan menilai keberhasilan Pemerintah Daerah yang telah diberi mandat untuk mengelola sampah laut dan memanfaatkannya menjadi sistem ekonomi sirkular bekerja (Larasati, 2005)

## Simpulan

Program Laut Sehat Bebas Sampah (Laut Sebasah) yang diinisiasikan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) merupakan bentuk respon tanggap pemerintah pusat dalam merespon isu darurat sampah laut yang sebagian besar berakar dari kebocoran sampah darat ke laut. Tingginya persentase sampah laut Indonesia tentu merusak ekologi laut, mencemari perairan, dan mengganggu keseimbangan hidup biota yang tinggal di dalamnya. Tak hanya itu, hal ini juga berdampak pada aspek ekonomi, terutama bagi masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan yang kerap kali mendapat hambatan akibat sampah laut ketika ingin mencari ikan, hingga pada aspek kesehatan yang cukup serius ketika masyarakat mengonsumsi hasil tangkapan laut yang sudah terkontaminasi mikroplastik. Berdasarkan analisis yang dilakukan, peneliti menilai keberhasilan program kerja ini didorong oleh sinergi antara struktur birokrasi yang hierarkis-sistematis sesuai model administrasi rasional Max Weber dan pendekatan

kolaboratif yang berakar pada teori New Public Service (NPS). Meski terdapat tantangan berupa ketimpangan kapasitas administratif antara pusat dan daerah serta potensi tumpang tindih kewenangan, KKP telah berupaya memperkuat tata kelola melalui SOP, penggunaan instrumen monitoring digital seperti SI SALUT, serta penerapan mekanisme akuntabilitas yang transparan. Melalui integrasi prinsip ekonomi sirkular yang melibatkan nelayan dan kerja sama lintas sektor, program ini menargetkan pengurangan sampah laut sebesar 70% pada tahun 2029, yang pada akhirnya menegaskan bahwa kunci keberlanjutan ekosistem laut Indonesia terletak pada harmonisasi antara komando birokrasi yang kuat dan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan, termasuk kerjasama masyarakat setempat. Mengingat program Laut Sebasah yang melibatkan kolaborasi antaraktor, diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat mengulas mengenai efektivitas kolaborasi yang dilakukan dalam program tersebut. Selain itu, peneliti turut merekomendasikan agar *open access* terkait tautan SI SALUT dapat segera direalisasikan sebagaimana dengan mandat KKP yang mengupayakan keterlibatan aktif masyarakat terkait.

## Referensi

- Addawiyah, A., Febriani, L., & Fadillah, N. (2025). Efektivitas implementasi kebijakan publik dalam mewujudkan pelayanan publik yang responsif: Tinjauan teoritis dan empiris. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 4(1), 27–35.
- Apriliano, R., Tauhid, C. J. P., & Prayoga, A. (2025). Implementasi care governance dalam administrasi publik: Studi eksploratif peran aktor non-manusia pada kebijakan lingkungan daerah. *Progres: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora*, 2(3). <https://journal.lpkd.or.id/index.php/Progres/article/view/2385>
- Cahyati, S. P., Naf'an, S. M., Savana, N. I., & Noviarin, Y. (2020). Rencana aksi nasional memerangi sampah laut sebagai bentuk implementasi SDGs 14: Kehidupan di bawah laut. *Jurnal ISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 17(2), 96–106.
- Davis, C. R. (1996). The administrative rational model and public organization theory. *Administration & Society*, 28(1), 39–60.
- Denhardt, J. V., & Denhardt, R. B. (2007). *The new public service*. M.E. Sharpe.
- Fikry, I., Putra, R. S. F. J., Nindyapuspa, A., Auliya, P. K., Abdillah, H. N., & Wuryaningrum, N. D. (2024). Penanganan sampah laut di Indonesia: A review. *Jurnal Teknologi Maritim*, 7(2), 77–87.
- Harding, S. (2016). Marine debris: Understanding, preventing and mitigating the significant adverse impacts on marine and coastal biodiversity. *CBD Technical Series*. <https://doi.org/10.1080/14888386.2007.9712830>

- Jambeck, J. (2015). Plastic waste inputs from land into the ocean. *Science*, 343(6223), 1655–1734. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415386.010>
- Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. (2025, 6 Agustus). *KKP canangkan program laut sehat bebas sampah (sebasah) untuk jaga ekosistem laut dari sampah*. <https://kkp.go.id/news/news-detail/kkp-canangkan-program-laut-sehat-bebas-sampah-sebasah-untuk-jaga-ekosistem-laut-dari-sampah-gp0Y.html>
- Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. (2025, 2 September). *Laut sebasah upaya nyata menyelamatkan laut Indonesia*. <https://kkp.go.id/news/news-detail/laut-sebasah-upaya-nyata-menyelamatkan-laut-indonesia-nR3R.html>
- Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2025, 24 Juni). Ribuan ASN KKP ikut program SAKIP terapkan budaya kerja akuntabel. <https://www.kkp.go.id/news/news-detail/ribuan-asn-kkp-ikut-program-sakip-terapkan-budaya-kerja-akuntabel-gpPr.html>
- Larasati, E. (2005). Akuntabilitas dalam *New Public Service paradigm* di Indonesia (Tesis Magister, Universitas Diponegoro). ePrints Undip. <http://eprints.undip.ac.id/41091/>
- Klijn, E. H., Koppenjan, J., Spekkink, W., & Warsen, R. (2025). *Governance networks in the public sector* (2nd ed.). Routledge.
- Kusumawati, I., Setyowati, M., & Salena, I. Y. (2018). Identifikasi komposisi sampah laut di pesisir Aceh Barat. *Jurnal Perikanan Tropis*, 5(1), 59–69.
- Meijer, L. J., Van Emmerik, T., Van Der Ent, R., Schmidt, C., & Lebreton, L. (2021). More than 1000 rivers account for 80% of global riverine plastic emissions into the ocean. *Science Advances*, 7(18), Artikel eaaz580. <https://doi.org/10.1126/sciadv.aaz5803>
- Noor, M., Suaedi, F., & Mardiyanta, A. (2022). *Collaborative governance: Suatu tinjauan teoritis dan praktik*. CV. Bildung Nusantara.
- Pratiwi, M. A., Yuwono, T., Astuti, R. S., & Afrizal, T. (2022). Analisis reformasi birokrasi untuk mewujudkan good governance pada Pemerintah Kabupaten Pematang. *Jurnal Perspektif*, 11(3), 1033–1042.
- Prihatini, Z., & Jatmiko, B. P. (2025, 30 Desember). *KKP: 20 juta ton sampah masuk ke laut*. Kompas. <https://lestari.kompas.com/read/2025/12/30/183000686/kkp--20-juta-ton-sampah-masuk-ke-laut-sumber-utamanya-dari-pesisir>
- Purwanto, H. E. (2025, 22 Januari). *Salah Komunikasi di Balik Polemik Pagar Laut Tangerang*. Republika. <https://analisis.republika.co.id/berita/sqgwp9393/salah-omunikasi-di-balik-polemik-pagar-laut-tangerang>

- Rakotoarisoa, M. F., Kurniasih, H., & Ranaivo, M. M. R. (2025). Advancing regional cooperation to combat marine debris and enhance livelihoods in Indonesia: Translating global agendas into local action. *Marine Pollution Bulletin*, 224, Artikel 119097. <https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2025.119097>
- Ramadhan, M. F., & Burhanuddin, A. (2023). Analisis penanggulangan pencemaran laut melalui kebijakan ASEAN framework of action on marine debris. *Jurnal Analisis Sosial Politik*, 7(2). <https://jasp.fisip.unila.ac.id/index.php/IASP/article/view/119>
- Rodiyah, I., Sukmana, H., & Mursyidah, L. (2021). *Buku ajar pengantar ilmu administrasi publik*. UMSIDA Press.
- Simon, H. A. (1946). The proverbs of administration. *Public Administration Review*, 6, 53–67.
- Small, C., & Nicholls, R. J. (2003). A global analysis of human settlement in coastal zones. *Journal Coastal Research*, 584–599.
- Sudirman, A., dkk. (2023). The impact of weak marine debris governance on the increased environmental insecurity in Southeast Asia. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 14(1), 141-159. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/politika/article/view/51595>
- Tempo. (2025, 29 Agustus). *KKP perkuat gerakan laut sebasah dengan bersih pantai di Padang*. <https://www.tempo.co/info-tempo/kkp-perkuat-gerakan-laut-sebasah-dengan-bersih-pantai-di-padang-2064517>
- Topçu, E. N., Tonay, A. M., Dede, A., Öztürk, A. A., & Öztürk, B. (2013). Origin and abundance of marine litter along sandy beaches of the Turkish Western Black Sea Coast. *Marine Environmental Research*, 85, 21–28.
- Tuhumury, S., Laurens, S., & Tuanaya, W. (2024). Implementasi kebijakan pemerintah dalam manajemen penanganan sampah di Kota Ambon. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 5(2), 1704-1717. <https://ejournal.nusantaraglobal.or.id/index.php/jige/article/view/2690>
- Walahe, D., Kau, F. R., Hadi, A., Ahmad, H., Andara, I., Siama, W., Yobee, A., & Darise, D. (2026). Analisis teori birokrasi Max Weber dalam konteks administrasi publik modern. *JPIM: Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, 3(1), 417–423.
- Wicaksono, I., & Aji, M. P. (2025). Weber's ideal bureaucracy implementation in the Secretariat Bureau of Headship at the Secretariat General of the Regional Representative Council. *Administration: Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan*, 16(1), 69–84. <https://doi.org/10.23960/administratio.v16i1.483>

Zulfahmi, I. (2023). Sampah laut dari aktivitas penangkapan ikan: Komposisi, dampak, dan penanganannya. Dalam *Pengelolaan sumber daya perikanan laut berkelanjutan* (hlm. 595–636). BRIN.